

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan regional Indo-Pasifik telah menjadi sebuah isu penting dalam perkembangan politik kawasan. Selama beberapa dekade terakhir pertumbuhan ekonomi di kawasan ini termasuk yang paling dinamis dan telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di dunia (International Monetary Fund, 2018). Akibatnya, wilayah ini terus mengalami pergeseran geopolitik dan geostrategis. Istilah Indo-Pasifik pertama kali digunakan pada Januari 2007 oleh Guurpret S. Khurana dalam jurnal akademiknya sebagai konsep geografis yang menunjukkan kawasan samudera Hindia dan samudera Pasifik sebagai kawasan regional strategis (Khurana, 2007). Menariknya, beberapa bulan kemudian pada Agustus 2007 Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menanggapi dalam pidatonya di depan Parlemen India. Ia menegaskan bahwa kawasan Pasifik dan Hindia sebagai tanggung jawab bersama dalam memelihara suatu kawasan yang menguntungkan dalam kerjasama yang bebas dan memakmurkan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2007). Pesan PM Shinzo Abe tersebut kemudian diformulasikan ke dalam sebuah term geopolitik “Indo-Pasifik” dan mulai disebar secara diplomatik tahun 2010 oleh Perdana Menteri India Manmohan Singh pada tahun 2010 dengan negara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Australia yang merupakan negara pendukungnya (Berlian, 2018).

Interaksi antar negara yang terjadi dalam Kawasan Indo-Pasifik dipengaruhi oleh keterlibatan negara-negara besar yang memiliki kepentingan dan kebijakan global, seperti dinamika wilayah maritim Indo-Pasifik yang tidak lagi didominasi oleh satu negara adidaya tetapi sedang dibentuk oleh beberapa

kekuatan besar. Salah satu contohnya yaitu Cina dengan kebijakan kawasan *One Belt One Road* (OBOR). Cina bersikukuh untuk memperluas kontrol wilayah strategis kawasan tersebut dengan menekankan kebijakan OBOR yang mengancam kepentingan negara lain. Kebijakan OBOR tersebut membuat banyak pihak menganggapnya sebagai kekuatan yang berpotensi membuat ketidakstabilan kawasan terutama bagi AS, Jepang, Australia, dan India (Komeini, 2019). Keempat negara tersebut memandang Cina sebagai ancaman nyata bagi kepentingan nasional dan stabilitas keamanan kawasan sehingga pada tahun 2017 PM Jepang Shinzo Abe menginisiasi sebuah konsep kebijakan kawasan bersama keempat negara yaitu AS, Jepang, Australia, dan India (*The Quadrilateral Security Dialogue/The Quad*) dengan merintis kebijakan kawasan yang dikenal dengan nama *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP).

Semakin besarnya pengaruh Cina di wilayah Asia Tenggara membuat beberapa negara menjadi waspada terhadap perangkap hutang Cina dengan mega proyek infrastrukturnya. Sebagai contoh, Thailand membentuk Pembiayaan Infrastruktur Regional bersama Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar untuk mengurangi ketergantungan hutang pada Cina. Selain itu, Malaysia berhasil menegosiasi ulang proyek *East Coast Rail Link* dengan menghentikan proyek senilai \$15,8 miliar pada Januari 2019. Keberhasilan negosiasi tersebut membuat pihak Cina menawarkan pengurangan biaya sebesar 30% pada April 2019 (NTD Indonesia, 2019). Jika negara-negara seperti ini ditarik, inisiatif FOIP Jepang dapat memiliki dampak besar di seluruh Asia.

Secara khusus, Jepang memiliki tiga prinsip dasar dalam konsep FOIP : 1) Promosi dan penegakan aturan hukum, kebebasan navigasi, perdagangan bebas, dan lain lain; 2) Percepatan kemakmuran ekonomi; 3) Komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019).

Sejak tahun 2017 *The Quad* telah sering mengadakan pertemuan pejabat senior dan membahas situasi strategis Indo-Pasifik. Setelah pertemuannya di Bangkok pada tanggal 31 Mei 2019, keempat negara tersebut mengeluarkan pernyataan resmi tentang upaya kolektif mereka untuk memajukan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif. Keempat negara mengingat kembali komitmen bersama mereka untuk melestarikan dan mempromosikan tatanan berbasis aturan di wilayah tersebut. Mereka menegaskan niat mereka untuk melanjutkan koordinasi dan kolaborasi yang erat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, keamanan maritim, dan tata pemerintahan yang baik. Dalam pidatonya dihadapan sidang majelis umum PBB di New York pada tahun 2018, PM Jepang Shinzo Abe menyatakan bahwa,

“Banyak negara ASEAN dan negara-negara kepulauan pasifik, serta Amerika Serikat, Australia, dan India, harus bekerja sama untuk melestarikan karunia laut terbuka tersebut dan terlibat dalam kerja sama ekonomi berdasarkan aturan hukum” (The Epoch Times, 2018)

Dalam meninjau perkembangan terakhir di kawasan Indo-Pasifik, keempat negara menyambut upaya yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN menuju Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya keempat negara menegaskan dukungan kuat mereka untuk sentralitas ASEAN dan arsitektur regional yang dipimpin ASEAN. Terakhir, keempat negara menggaris bawahi niat mereka untuk melanjutkan konsultasi rutin tentang keterlibatan dan inisiatif Indo-Pasifik bersama-sama dan dengan negara-negara dan lembaga-lembaga lain yang berkepentingan untuk mendukung wilayah yang beragam, damai, dan makmur. Dengan pernyataan tersebut maka *The Quad* telah menyetujui tiga prinsip dasar dalam konsep FOIP. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2019)

Pada praktiknya, FOIP melibatkan pengaturan beberapa koridor untuk mempromosikan perdagangan bebas dan terbuka

di kawasan Indo-Pasifik. Inisiatif tersebut termasuk meningkatkan jalur kereta api Yangon-Mandalay di Burma, mendirikan koridor industrial Delhi-Mumbai di India, serta koridor Nacala yang mencakup tiga negara Afrika yakni Malawi, Zambia, dan Mozambik (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019).

Daya tarik strategi FOIP semakin banyak mendapat perhatian khususnya di Asia, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 dalam kunjungannya ke beberapa negara di Asia. Dalam pidatonya dia tidak lagi menggunakan istilah wilayah Asia Pasifik melainkan wilayah Indo-Pasifik. Donald Trump telah menjadikan keterlibatan AS di kawasan Indo-Pasifik sebagai prioritas utama dari pemerintahannya. Pada November 2017 di Vietnam dalam Forum KTT APEC, ia menjabarkan visi untuk Indo Pasifik yang bebas dan terbuka di mana semua negara makmur berdampingan sebagai negara berdaulat dan merdeka (Department of State United States of America, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi Jepang dalam mengaplikasikan soft balancing sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh Cina di kawasan Asia-Pasifik?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori *soft balancing* sebagai pisau analisis untuk menunjukkan strategi Jepang dalam mengimbangi pengaruh Cina di kawasan Asia-Pasifik.

1. Teori Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu determinan utama yang menggerakkan negara-negara dalam menjalankan politik luar negeri. Konsep tersebut masih menjadi alat kunci dalam memahami hubungan internasional khususnya dalam analisis kebijakan luar negeri. Menurut Theodore Couloumbis dan James Wolfe, kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat penting untuk memberikan penjelasan, deskripsi, prediksi, atau membuat preskripsi tentang perilaku internasional (Couloumbis & Wolfe, 1990).

Makna dari konsep kepentingan nasional memiliki banyak pendapat, salah satu yang terkenal ialah pendapat Hans J. Morgenthau, seorang pakar yang dikenal sebagai pelopor realisme dalam studi HI. Menurutnya, apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain merupakan kepentingan nasional setiap negara sehingga kepentingan nasional merupakan dasar utama dalam mendukung politik luar negeri dan politik internasional suatu negara (Mas'ood M., 1990).

Sedangkan menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional merupakan motivasi serta faktor yang mendasari para pembuat kebijakan dalam memutuskan dan merumuskan politik luar negeri. Menurutnya, konsep kepentingan nasional terdiri dari beberapa elemen yang hendak dituju yaitu, 1) *self preservation*, yakni menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan ancaman yang mengganggu kestabilan negara merupakan hak setiap negara; 2) *independence*, yaitu merdeka dan mandiri merupakan haknya sebagai negara; 3) *territorial integrity*, yang berarti negara berhak untuk menjaga teritorial negara atau keutuhan wilayahnya; 4) *military security*, tidak ada ancaman secara militer dari negara lain; 5) *economic well-being*, yaitu kesejahteraan ekonomi, kestabilan sektor ekonomi harus selalu dijamin

oleh pemerintah dengan tujuan terciptanya kesejahteraan di negara tersebut (Plano & Olton, 1982).

Seiring dengan beberapa elemen yang telah dijelaskan oleh Plano dan Olton, konsep kepentingan nasional dapat diaplikasikan dalam analisis penulisan ini, yang mana pengaruh OBOR Cina merupakan ancaman terhadap kepentingan nasional Jepang dan tekanan tersendiri bagi aliansinya. Selain itu, kawasan Asia-Pasifik memiliki potensi luar biasa yang dapat dikembangkan secara ekonomi dan maritim sehingga stabilitas dan keamanan di wilayah Asia-Pasifik yang secara geografis dekat dengan teritorial Jepang sangat penting artinya bagi Jepang untuk memastikan posisinya sebagai salah satu negara maju yang mempunyai pengaruh di wilayah tersebut.

2. *Soft Balancing*

Dunia internasional dalam pandangan realis adalah dunia yang anarkis. Setiap negara mengedepankan kepentingan masing-masing. Kepentingan yang paling dasar adalah menjadi negara merdeka. Untuk negara yang kuat maka memiliki kepentingan lebih besar yakni melakukan dominasi terhadap negara lain. Keinginan negara kuat untuk mendominasi menjadi ancaman bagi negara lain. Hal ini menjadi asumsi dasar konsep *Balance of Power*. Teori *Balance of Power* adalah konsep yang telah digunakan selama beberapa abad, dan perilaku dari teori tersebut dapat diamati dari catatan sejarah sejak hubungan negara Yunani kuno. Konsep tersebut terbentuk berdasarkan unit analisisnya yaitu negara atau bangsa (Gill). Negara-negara harus menggunakan swadaya dalam sistem internasional yang anarkis demi kelangsungan kedaulatan negara yang merupakan kepentingan utamanya.

Dengan melihat kondisi negara-negara yang saling bersaing menjaga kedaulatannya berpotensi menimbulkan perang maka diperlukan *balancing* untuk mencapai

keamanan dan stabilitas dunia. Sejalan dengan teori *Balance of Power*, teori *Balancing* dapat diartikan sebagai strategi negara yang dirancang untuk melawan ancaman eksternal yang dirasakan dengan cara militer atau non militer.

Balancing diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *balance* yang berarti seimbang. Dasar pemikiran *balancing* menurut T.V. Paul yaitu, 1) Sistem internasional bersifat anarki dan tidak ada pihak yang menjamin keamanan bagi negara; 2) Negara-negara ingin mempertahankan hidup sebagai entitas yang independen; 3) Kompetensi kekuatan militer dan ekonomi adalah fakta dalam politik internasional; dan 4) Ketika satu negara berusaha lebih dominan, negara-negara yang merasa terancam akan membentuk koalisi pertahanan (mekanisme eksternal) atau meningkatkan kekuatannya (mekanisme internal) (Paul, Summer 2005, hal. 51). Menurut Hans Morgenthau dan Kenneth Thompson, *balance* yaitu upaya dari satu negara untuk menangkal kekuatan negara lain dengan meningkatkan kekuatannya ke titik di mana ia setidaknya setara atau bahkan unggul dengan kekuatan bangsa lain (Morgenthau & Thompson, 1950, hal. 103). Robert J. Art juga menawarkan definisi alternatif *balancing* yang cukup terbuka. Ia menyatakan bahwa *balancing* mengacu pada perilaku yang dirancang untuk menciptakan jangkauan hasil yang lebih baik bagi negara dibandingkan dengan negara lain atau negara-negara yang berkoalisi dengan cara menambah aset kekuatan yang tersedia (Art, 2006, hal. 183-184). Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengimbangi atau mengurangi keuntungan yang dinikmati oleh negara atau koalisi lainnya. Menurut Kai He *balancing* bertujuan untuk menggeser kekuatan relatif demi mencapai keuntungan dibandingkan dengan kekuatan negara yang mengancam. Akibatnya, penyeimbangan diarahkan pada target tertentu yaitu negara yang paling mengancam, negara adidaya yang berpotensi

mengancam, atau bahkan saingan tradisionalnya (He, 2012).

Soft Balancing dapat didefinisikan sebagai suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara, menyeimbangkan kekuatan dari negara lain, atau untuk mengurangi kekuatan negara yang mengancam agar tidak hanya ada satu negara yang mendominasi dalam sebuah kawasan atau isu tertentu yang melibatkan instrumen non militer.

Dewasa ini banyak negara telah terlibat dalam perilaku kebiasaan *balancing*, namun strategi *Soft Balancing* lebih banyak digunakan sebagai konsep daripada strategi *Hard Balancing* yang merupakan konsep tradisional. Di sisi lain, *Soft Balancing* melibatkan tindakan yang tidak secara langsung menantang kekuatan militer yang lebih besar, tetapi sebaliknya dimaksudkan untuk membatasi kekuatan militer tersebut.

Soft Balancing mencapai tujuannya dengan cara membatasi kekuatan dominan suatu negara yang bertindak secara sepihak tanpa memprovokasi secara langsung. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pembatasan tersebut juga dapat menciptakan hubungan *Hard Balancing* dengan negara lawan di masa yang akan datang (Gill). Dalam jurnalnya Andreas dan Ingo membagi teori *Soft Balance* ke dalam beberapa tipe dan perilaku *balancing* dengan '*Tipology Balancing*'nya (Bock & Henneberg, 2003), yaitu;

Tabel 1. 1

<i>Internal (positive) balancing</i>	<i>External (negative) balancing</i>
<ul style="list-style-type: none">• <i>Balancing through publics goods substitution</i>• <i>Territorial denial</i>• <i>Economic strengthening</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Divide and balance</i>• <i>Proxy balancing</i>• <i>Binding</i>• <i>Wedge strategies</i>• <i>Transcending</i>• <i>Weak States Alliance</i>• <i>Entangling diplomacy</i>

Disisi lain, Pape menyebutkan bahwa terdapat empat taktik kunci yang biasa dilakukan oleh negara untuk melakukan *soft balancing*, yaitu *territorial denial*, *entangling diplomacy*, *economic strengthening*, *signals of resolve to balance* (Pape, 2005, pp. 36-37).

Territorial denial (penolakan teritorial) ialah strategi yang dilakukan suatu negara dengan menolak akses negara adidaya melakukan keperluan militer terhadap wilayah teritorialnya. Negara adidaya biasanya akan membutuhkan akses ke suatu wilayah tertentu di negara lain sebagai basis militer atau transit angkatan darat, udara, atau laut ketika ingin melakukan peperangan dengan suatu musuh yang wilayahnya berdekatan dengan negara tersebut. Penolakan akses wilayah ini dapat mengurangi prospek kemenangan negara adidaya karena akan menambah beban biaya logistik perang dan sulitnya menjalankan taktik militer

dengan memaksanya untuk bertarung dengan kekuatan udara atau laut saja (Pape, 2005, p. 36).

Entangling diplomacy (perumitan diplomatis) yakni strategi suatu negara untuk menahan negara adidaya melalui jalur-jalur diplomatis pada institusi-institusi internasional atau perundingan-perundingan multilateral. Strategi ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap negara tidak memiliki kemerdekaan penuh dalam menjalankan kebijakan luar negeri semauanya sendiri melainkan terikat dengan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang telah ia setuju di suatu organisasi internasional maupun praktek-praktek diplomatis yang diterima. Negara adidaya mematuhi peraturan atau prosedur tersebut agar aksinya lebih legal (*legitimate*) dan mendapat dukungan berbagai pihak. Strategi ini digunakan untuk menunda dan memperlambat rencana perang. Selain itu apabila negara adidaya adalah negara demokrasi, *entangling diplomacy* dapat menyediakan waktu bagi berkembangnya penolakan domestik terhadap rencana perang negara adidaya tersebut (Pape, 2005, p. 36).

Economic strengthening (penguatan kekuatan ekonomi) ialah salah satu upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antar negara secara efektif dalam jangka panjang. Dalam strategi ini negara dapat menguatkan kemampuan ekonominya untuk memperbesar porsinya dalam distribusi kekuasaan internasional dan disisi lain mengurangi kekuatan dominan negara adidaya dengan cara membangun suatu blok perdagangan untuk menaikkan produktifitas perdagangan antar anggota dan mengurangi perdagangan dengan non anggota (Pape, 2005, p. 37).

Signals of resolve to balance (tekad kuat dan komitmen untuk melakukan *balancing*) yakni sebuah komitmen negara-negara yang ingin melakukan upaya *balancing* secara kolektif dan saling mempercayai satu sama lain. Apabila ada negara yang menghindari tanggung jawab

bersama maka ia akan menghadapi negara adidaya sendirian tanpa dukungan dari negara lain yang membuat ia harus menanggung segala beban dan risiko dalam upaya *balancing* tersebut (Pape, 2005, p. 37).

Perbedaan antara kegiatan *soft balancing* dengan kegiatan diplomasi internasional biasa adalah pada hasil akhir yang diharapkan. Kegiatan *soft balancing* dilakukan dengan harapan untuk mengubah struktur perimbangan kekuatan atau membatasi kekuatan negara adidaya. Sedangkan kegiatan diplomasi pada umumnya biasa dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dalam hubungan internasional melalui kompromi-kompromi tertentu (Pape, 2005, p. 37).

Upaya *soft balancing* yang diterapkan oleh Jepang melalui kebijakan FOIP salah satunya yaitu strategi *economic strengthening* dengan program *Pursuit of Economic Prosperity* (percepatan kemakmuran ekonomi) yang mempunyai tiga komponen ; 1) *Physical connectivity* (konektivitas fisik) dengan membangun infrastruktur yang berkualitas (pelabuhan, kereta, jalan), 2) *people-to-people connectivity* (konektivitas orang ke orang) dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan berbasis persahabatan, dan 3) *institutional connectivity* (konektivitas kelembagaan) melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA) dan *Free Trade Agreement* (FTA) (Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019). Konektivitas merupakan kata kunci utama pada program ekonomi FOIP Jepang. Di sini Jepang menargetkan terbangunnya konektivitas pada tiga bidang khusus: Koridor Ekonomi Timur-Barat dan Selatan di Asia Tenggara, Proyek Peningkatan Konektivitas Timur Laut (India) dan Zona Pertumbuhan Industri Teluk Benggala di Asia Barat Daya, dan Asia Tenggara ke Afrika Tenggara bagian Utara, serta Koridor melalui Asia Barat Daya dan Timur Tengah.

Konektivitas Asia Tenggara sedang direalisasikan melalui proyek transportasi umum seperti meningkatkan jalur kereta api Yangon-Mandalay, pengembangan infrastruktur rel kereta berkecepatan tinggi Mumbai-Ahmedabad yang sedang berlangsung dengan rencana India untuk membeli 18 kereta *shinkansen* Jepang. (Arora, 2018)

Melihat potensi kerjasama yang efektif dan kebangkitan Cina yang mengancam stabilitas kawasan, Jepang berupaya untuk memastikan situasi kawasan yang lebih stabil melalui skema FOIP dengan berbagai macam program kerjasama yang inklusif dan terbuka bagi kepentingan bersama. Dengan demikian menjadikan kawasan yang terbuka serta memberikan kebebasan bagi aktivitas perekonomian dunia menghadirkan daya tarik tersendiri dalam dinamika politik internasional.

D. Hipotesis

Jepang melakukan upaya *soft balancing* untuk mengimbangi pengaruh kebijakan *One Belt One Road* Cina di kawasan Asia-Pasifik berupa kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* melalui strategi *economic strengthening* dengan program *Pursuit of Economic Prosperity* (percepatan kemakmuran ekonomi). Penerapan program tersebut mempunyai tiga komponen utama, yaitu:

1. *Physical connectivity* dengan membangun infrastruktur yang berkualitas (pelabuhan, kereta, jalan).
2. *People to people connectivity* dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan berbasis persahabatan.
3. *Institutional connectivity* melalui lembaga *Economic Partnership Agreement* (EPA) dan *Free Trade Agreement*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini secara umum dimaksudkan untuk mengkaji dan memberi gambaran objektif mengenai identifikasi kepentingan nasional Jepang di kawasan Asia-Pasifik dan strateginya dalam mengimbangi pengaruh Cina di kawasan Asia-Pasifik.

F. Batasan Penelitian

Penulis membatasi lingkup penelitian ini dalam rentang waktu kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe pada periode ke-dua jabatannya, yaitu pada tahun 2012-2019.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah Studi Literatur dan *Online Research* yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi, majalah ilmiah dan buku-buku teks yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah berupa data sekunder dari literatur (buku, jurnal ilmiah, media cetak, dan situs internet).

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan di antara fakta-fakta tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian akan membagi bentuk penelitian menjadi lima bab untuk menjelaskan mengenai topik penelitian berjudul **“Strategi Jepang Dalam Mengimbangi Pengaruh Cina di Kawasan Asia-Pasifik melalui *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) pada Era Pemerintahan Shinzo Abe Tahun 2012-2019”**

BAB 1 Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Penulis akan menjabarkan posisi strategis dan kepentingan Jepang dalam kawasan Asia-Pasifik. Mulai dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.

BAB III Penulis akan menjabarkan tentang OBOR Cina dan pengaruhnya dalam kawasan Asia-Pasifik. Mulai dari terbentuknya serta ancaman yang mungkin di dapat oleh pemerintah Jepang dari OBOR tersebut.

BAB IV Penulis akan menjelaskan mengenai upaya Jepang dalam penyeimbangan kekuatan melalui FOIP. Mulai dari mengajak kerjasama dan meyakinkan negara-negara Indo-Pasifik akan FOIP serta bagaimana sebenarnya konsep dari FOIP.

BAB V Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV